

PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEBIJAKAN: PENDEKATAN NORMATIF, EMPIRIS, DAN KRITIS DALAM ANALISIS KEBIJAKAN

Saniatur Rodhiah¹, Sri Susmiati², Sabran³

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda^{1,2,3}

e-mail: saniaturrodhiah1@gmail.com¹, srisusmiyati2@gmail.com², sabran@uinai.ac.id³

Diterima: 26/4/2026; Direvisi: 8/5/2026; Diterbitkan: 16/5/2026

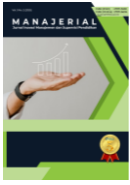
ABSTRAK

Analisis kebijakan merupakan proses penting dalam memahami, menilai, dan mengevaluasi kebijakan publik, termasuk dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai pedoman dalam mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis yang komprehensif untuk memahami dinamika kebijakan pendidikan secara lebih mendalam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tiga pendekatan utama dalam analisis kebijakan, yaitu pendekatan normatif, empiris, dan kritis, serta relevansinya dalam analisis kebijakan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan analisis kebijakan dan kebijakan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan normatif menekankan pentingnya nilai, prinsip, dan tujuan pendidikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan; pendekatan empiris berfokus pada fakta dan data yang menggambarkan realitas implementasi kebijakan di lapangan; sedangkan pendekatan kritis menyoroti aspek keadilan, kepentingan, dan struktur sosial yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kebijakan pendidikan. Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut secara integratif, analisis kebijakan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, relevan, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Analisis Kebijakan, Pendekatan Normatif, Pendekatan Empiris, Pendekatan Kritis, Kebijakan Pendidikan*

ABSTRACT

Policy analysis is an essential process in understanding, assessing, and evaluating public policies, including those in the field of education. Educational policy does not merely function as an administrative instrument but also serves as a guideline for directing the implementation of education in accordance with national education goals. Therefore, a comprehensive analytical approach is required to understand the dynamics of educational policies more deeply. This article aims to examine three main approaches in policy analysis, namely normative, empirical, and critical approaches, and their relevance in analyzing educational policies. This study employs a qualitative method using a library research approach by analyzing various literature sources related to policy analysis and educational policy. The results of the study indicate that the normative approach emphasizes the importance of values, principles, and educational objectives as the foundation for policy formulation; the empirical approach focuses on facts and data that reflect the reality of policy implementation in practice; while the critical approach highlights issues of justice, interests, and social structures that influence the policy-making process. These three approaches complement each other in providing a more



comprehensive understanding of educational policies. By integrating these approaches, policy analysis in education is expected to generate more effective, relevant, and equitable policy recommendations.

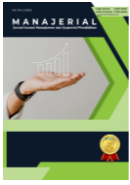
Keywords: *Policy Analysis, Normative Approach, Empirical Approach, Critical Approach, Education Policy.*

PENDAHULUAN

Analisis kebijakan merupakan bagian penting dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Analisis kebijakan merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memahami, menilai, serta memberikan rekomendasi terhadap suatu kebijakan publik. Melalui analisis kebijakan, berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan dapat dikaji secara lebih mendalam, mulai dari latar belakang kebijakan, proses perumusan, implementasi, hingga dampak yang dihasilkan. Melalui analisis kebijakan, suatu keputusan tidak hanya dipahami sebagai produk administratif, tetapi sebagai hasil dari pertimbangan nilai, data empiris, serta dinamika sosial dan politik yang melatarbelakanginya. Dalam konteks pendidikan maupun pemerintahan, kualitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh pendekatan analisis yang digunakan. Tanpa analisis yang komprehensif, kebijakan berpotensi tidak efektif, tidak tepat sasaran, bahkan menimbulkan ketimpangan baru (Dahyanti et al., 2024; Hastuti et al., 2022; Safitri et al., 2021; Yanti, 2020).

Secara teoretis, kajian analisis kebijakan telah berkembang sejak pemikiran awal tokoh seperti Harold Lasswell, yang menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami proses kebijakan. Perkembangan tersebut kemudian melahirkan berbagai pendekatan yang digunakan untuk menelaah kebijakan, di antaranya pendekatan normatif, empiris, dan kritis. Analisis kebijakan merupakan salah satu disiplin penting dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam konteks pemerintahan modern, kebijakan tidak lagi dipahami sekadar sebagai keputusan politik, tetapi sebagai instrumen strategis yang harus dirancang berdasarkan pertimbangan ilmiah, rasional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, pendekatan dalam analisis kebijakan berkembang sejalan dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Tiga pendekatan yang paling sering digunakan dan dianggap fundamental dalam kajian kebijakan adalah pendekatan normatif, empiris, dan kritis. Ketiga pendekatan ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam melihat kebijakan, mulai dari aspek idealitas nilai, realitas faktual, hingga relasi kekuasaan yang memengaruhi kebijakan (Irawan & Haris, 2022; Purike, 2021; Saptono & Khozen, 2021; Tauhid, 2020).

Pendekatan normatif berfokus pada bagaimana kebijakan seharusnya dibuat berdasarkan nilai, norma, atau prinsip moral tertentu. Namun dalam praktiknya, kebijakan tidak selalu sejalan dengan idealisme normatif karena sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, keterbatasan sumber daya, dan dinamika sosial. Pendekatan normatif berfokus pada pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan seharusnya dirumuskan berdasarkan nilai, prinsip, dan tujuan tertentu. Sebaliknya, pendekatan empiris menekankan pada fakta, data, serta bukti yang menunjukkan bagaimana kebijakan bekerja dalam praktik, pendekatan empiris mengutamakan bukti dan data faktual untuk menilai efektivitas kebijakan. Meskipun demikian, penggunaan data empiris sering kali bersifat teknokratis dan kurang mempertimbangkan dimensi keadilan sosial dan konteks sosial-politik yang melingkupi suatu kebijakan. Sementara itu, pendekatan kritis melihat kebijakan sebagai produk sosial yang tidak lepas dari kepentingan, ideologi, dan struktur kekuasaan, sebagaimana banyak dipengaruhi oleh

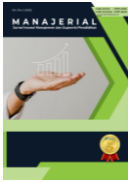


pemikiran tokoh seperti Michel Foucault yang menyoroti hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan pendekatan kritis hadir sebagai respon terhadap keterbatasan dua pendekatan sebelumnya, dengan menyoroti relasi kuasa, ketidakadilan, serta struktur sosial yang memengaruhi cara kebijakan dirumuskan dan dijalankan (Auladi, 2020; Barasa & Riyanto, 2023; Farauqi, 2022; Hidayah et al., 2023; Wandalibrata, 2020).

Sejumlah penelitian dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa analisis kebijakan yang hanya mengandalkan satu pendekatan tidak cukup untuk memahami kompleksitas kebijakan publik kontemporer. Penelitian mutakhir memperlihatkan bahwa banyak kebijakan yang gagal karena mengabaikan aspek normatif seperti nilai keadilan, tidak didasarkan pada data empiris yang memadai, atau tidak mempertimbangkan struktur kekuasaan yang memengaruhi proses kebijakan. Misalnya, kebijakan pendidikan, kesehatan, dan reforma agraria di berbagai negara menunjukkan bahwa penggunaan data empiris saja tidak mampu menyelesaikan persoalan ketika nilai keadilan dan relasi kuasa tidak diperhitungkan. Hal tersebut menegaskan perlunya analisis kebijakan yang lebih komprehensif dan integratif. Dalam praktiknya, analisis kebijakan sering kali hanya menggunakan satu pendekatan, sehingga menghasilkan pemahaman yang parsial. Padahal, kompleksitas persoalan publik menuntut penggunaan pendekatan yang lebih integratif. Beberapa ahli analisis kebijakan, seperti William N. Dunn, menegaskan bahwa analisis kebijakan perlu menggabungkan dimensi normatif dan empiris, serta membuka ruang refleksi kritis agar kebijakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Hanson-DeFusco, 2022; Hantono et al., 2024; Pujiantoro & Panjaitan, 2025; Safitri et al., 2021; Waskitojati et al., 2020).

Kesenjangan antara konsep ideal dan praktik di lapangan semakin terlihat ketika kebijakan publik harus menjawab isu-isu aktual seperti ketimpangan sosial, digitalisasi, kemiskinan struktural, dan perubahan iklim. Di tingkat ideal, kebijakan seharusnya dirumuskan secara objektif, adil, dan berbasis bukti. Namun kenyataannya, banyak kebijakan yang masih lahir melalui kompromi politik, minim data lapangan, serta kurang sensitif terhadap kelompok rentan. Kesenjangan inilah yang menimbulkan urgensi untuk mengkaji kembali tiga pendekatan utama dalam analisis kebijakan, bukan hanya sebagai konsep teoretis, tetapi juga dalam relevansi dan aplikasinya terhadap persoalan kontemporer. Dalam bidang pendidikan, analisis kebijakan memiliki peran yang sangat penting karena kebijakan pendidikan secara langsung mempengaruhi proses pembelajaran, kualitas pendidikan, serta perkembangan peserta didik. Analisis kebijakan pendidikan tidak hanya berfungsi untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam proses implementasinya.

Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Artikel ini menawarkan nilai kebaruan berupa upaya integratif untuk menelaah tiga pendekatan tersebut secara simultan, bukan sebagai pendekatan yang berdiri sendiri-sendiri. Inovasi yang dibawa adalah pemetaan bagaimana pendekatan normatif, empiris, dan kritis dapat saling melengkapi dalam menghasilkan analisis kebijakan yang lebih komprehensif dan relevan. Pendekatan integratif ini diharapkan mampu menjawab tantangan kebijakan publik masa kini yang memerlukan perpaduan antara nilai, data, dan kesadaran kritis. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan peneliti untuk memperbaiki kualitas analisis maupun pengambilan keputusan publik.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi *library research* yang berfokus pada penelusuran serta penafsiran literatur ilmiah mengenai berbagai kerangka kerja kebijakan. Sumber data utama mencakup buku teks, artikel jurnal terakreditasi, dan dokumen resmi yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir guna menjamin relevansi dengan isu kontemporer. Prosedur pelaksanaan dimulai dengan mengidentifikasi materi menggunakan kata kunci spesifik seperti *normative approach*, *empirical policy analysis*, *critical policy studies*, dan *policy analysis frameworks*. Penelusuran dilakukan secara sistematis melalui pangkalan data digital seperti Google Scholar, *repository* perguruan tinggi, SINTA, hingga DOAJ. Setelah pengumpulan, peneliti melakukan seleksi ketat dengan membaca abstrak dan isi awal dokumen untuk memastikan keterkaitannya dengan fokus kajian. Data kemudian diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama, yaitu perspektif normatif, empiris, dan kritis, guna mempermudah pemetaan argumen secara terstruktur. Tahap ini krusial untuk menghasilkan basis data yang kredibel sebelum dilakukan analisis mendalam terhadap informasi yang telah diperoleh secara menyeluruh.

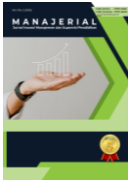
Proses pengumpulan data dilanjutkan dengan teknik ekstraksi informasi mendalam untuk mencatat argumen teoretis serta temuan krusial dari setiap referensi terpilih. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang melakukan pembacaan intensif dan penafsiran secara langsung, didukung oleh alat bantu berupa *checklist* evaluasi sumber sebagai panduan penilaian kualitas literatur. Teknik analisis data yang diterapkan adalah *content analysis* yang dijalankan melalui 3 tahapan sistematis. Pertama, dilakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang paling berkontribusi pada kajian analisis kebijakan. Kedua, data disajikan dalam bentuk uraian tematik yang membandingkan karakteristik dari ketiga pendekatan yang diteliti secara integratif. Terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan menyintesis seluruh temuan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai dinamika transisi antarpendekatan tersebut. Seluruh rangkaian prosedur ini dirancang untuk menjamin objektivitas dalam memetakan perbedaan mendasar antara logika normatif, empiris, dan kritis dalam kebijakan publik. Melalui instrumen pengamatan yang teliti, hasil akhir penelitian mampu memberikan gambaran komparatif yang tajam dan akurat bagi pengembangan ilmu kebijakan masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan normatif, empiris, dan kritis dalam analisis kebijakan memiliki karakteristik, fokus, dan kontribusi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memahami dinamika perumusan dan implementasi kebijakan publik. Berdasarkan hasil telaah pustaka terhadap berbagai literatur, diperoleh tiga temuan utama: (1) Karakteristik Pendekatan Normatif, Empiris, dan Kritis; (2) Integrasi Pendekatan Normatif dalam Kebijakan Pendidikan; (3) Analisis Empiris terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan; (4) Perspektif Kritis dalam Analisis Kebijakan Pendidikan; (5) Kelebihan dan Keterbatasan Setiap Pendekatan; (6) Integrasi Pendekatan dalam Analisis Kebijakan; dan (7) Relevansi dalam Analisis Kebijakan Pendidikan.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan normatif, empiris, dan kritis dalam analisis kebijakan memiliki karakteristik, fokus, dan kontribusi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memahami dinamika perumusan dan implementasi kebijakan



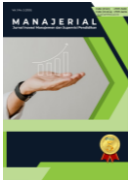
publik. Berdasarkan hasil telaah pustaka terhadap berbagai literatur, diperoleh tujuh temuan utama sebagaimana tersaji pada Tabel 1. Ketujuh temuan ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana ketiga pendekatan digunakan, diintegrasikan, serta diterapkan dalam konteks kebijakan pendidikan.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Utama Penelitian

No	Temuan Utama	Fokus Utama Kajian
1	Karakteristik Pendekatan Normatif, Empiris, dan Kritis	Menjelaskan orientasi nilai, data, dan struktur kekuasaan dalam kebijakan
2	Integrasi Pendekatan Normatif dalam Kebijakan Pendidikan	Menunjukkan relevansi nilai moral, etika, dan keadilan dalam penyusunan kebijakan
3	Analisis Empiris terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan	Menggambarkan penggunaan data dalam mengevaluasi efektivitas program pendidikan
4	Perspektif Kritis dalam Analisis Kebijakan Pendidikan	Mengungkap relasi kuasa, ketimpangan, dan dampak kebijakan bagi kelompok tertentu
5	Kelebihan dan Keterbatasan Setiap Pendekatan	Menyajikan kekuatan dan kelemahan pendekatan normatif, empiris, dan kritis
6	Integrasi Pendekatan dalam Analisis Kebijakan Pendidikan	Menjelaskan kebutuhan menggabungkan nilai, evidensi, dan kritik sosial
7	Relevansi dalam Analisis Kebijakan Pendidikan	Menunjukkan kontribusi ketiga pendekatan terhadap isu pendidikan kontemporer

Karakteristik Pendekatan Normatif, Empiris, dan Kritis

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pendekatan normatif, empiris, dan kritis memiliki fokus analisis yang berbeda namun saling melengkapi. Pendekatan normatif menempatkan nilai, tujuan, dan prinsip sebagai dasar dalam menilai kebijakan. Kebijakan dipandang baik apabila sesuai dengan standar ideal seperti keadilan, pemerataan, efektivitas, dan keberlanjutan. Pendekatan ini berperan penting pada tahap perumusan kebijakan karena membantu menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu, pendekatan empiris berorientasi pada fakta dan data mengenai implementasi kebijakan. Pendekatan ini menilai kebijakan berdasarkan bukti lapangan, seperti capaian program, dampak kebijakan, serta kendala pelaksanaan. Dengan demikian, pendekatan empiris berfungsi sebagai alat evaluasi yang memungkinkan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Berbeda dengan keduanya, pendekatan kritis menyoroti dimensi kekuasaan, ideologi, dan kepentingan yang memengaruhi kebijakan. Pendekatan ini melihat kebijakan bukan hanya sebagai solusi teknis, tetapi sebagai produk sosial yang dapat memperkuat atau mengurangi ketimpangan. Oleh karena itu, pendekatan kritis berperan dalam membuka ruang refleksi terhadap dampak kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang berbeda (Febrinaharnum & Prasajo, 2025; Molla, 2021; Wibisono & Purwanto, 2020; Yaneri & Deswanti, 2021).



Integrasi Pendekatan Normatif dalam Kebijakan Pendidikan

Pendekatan normatif dalam kebijakan pendidikan menekankan pentingnya nilai dan tujuan pendidikan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan. Kebijakan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, tujuan pendidikan nasional menekankan pada pembentukan manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, serta berakhlak mulia. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut. Pendekatan normatif membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan tetap berorientasi pada nilai-nilai moral, etika, serta tujuan pendidikan yang ideal (Hidayat & Suharto, 2022; Sakdah & Hidayat, 2022; Selamat et al., 2022).

Analisis Empiris terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan

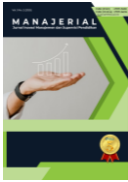
Pendekatan empiris memberikan kontribusi penting dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan pendidikan. Melalui pendekatan ini, kebijakan pendidikan dapat dianalisis berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh, implementasi kebijakan kurikulum dapat dianalisis melalui berbagai indikator seperti kualitas pembelajaran di kelas, tingkat pemahaman siswa, serta kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum tersebut. Data empiris dari hasil penelitian pendidikan, evaluasi program, maupun pengalaman praktis di sekolah dapat menjadi dasar dalam menilai keberhasilan kebijakan tersebut. Pendekatan empiris juga memungkinkan para pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan (Akib, 2020; Fionita et al., 2024; Nurcahya et al., 2024; Yanti et al., 2024).

Perspektif Kritis dalam Analisis Kebijakan Pendidikan

Pendekatan kritis memberikan dimensi yang lebih reflektif dalam analisis kebijakan pendidikan. Pendekatan ini mendorong para peneliti dan pengambil kebijakan untuk melihat kebijakan pendidikan tidak hanya dari aspek efektivitas, tetapi juga dari aspek keadilan dan kesetaraan. Dalam beberapa kasus, kebijakan pendidikan yang dirancang secara ideal mungkin menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, terutama dalam konteks perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kritis penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak menimbulkan ketimpangan akses pendidikan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan kritis, analisis kebijakan pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kekuasaan, kepentingan, serta struktur sosial yang mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi kebijakan pendidikan (Molla, 2021; Putri & Salito, 2024; Raflika et al., 2024; Triguna et al., 2023).

Kelebihan dan Keterbatasan Setiap Pendekatan

Pendekatan normatif memiliki kelebihan dalam memberikan arah nilai dan visi jangka panjang kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan melalui pendekatan ini cenderung memiliki landasan filosofis yang kuat. Namun, keterbatasannya terletak pada kecenderungan yang abstrak dan kurang mempertimbangkan kondisi nyata apabila tidak didukung data empiris. Pendekatan empiris unggul dalam menghasilkan analisis berbasis bukti sehingga kebijakan dapat dievaluasi secara objektif. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan dan hasil kebijakan. Akan tetapi, fokus yang terlalu teknis dapat membuat analisis kurang mempertimbangkan nilai dan dimensi keadilan. Pendekatan kritis memiliki kekuatan dalam mengungkap relasi kekuasaan dan dampak kebijakan terhadap ketimpangan sosial. Pendekatan ini mendorong kebijakan yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Meski demikian,



pendekatan kritis sering dianggap kurang memberikan rekomendasi teknis yang praktis apabila tidak dikombinasikan dengan pendekatan lain (Abdy et al., 2026; Apriliandra & Krisnani, 2021; Bangsawan, 2023; Pemberian, 2024; Wijiharjono, 2021).

Integrasi Pendekatan dalam Analisis Kebijakan

Kajian ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas kebijakan. Analisis kebijakan yang komprehensif memerlukan integrasi ketiga pendekatan. Pendekatan normatif memberikan arah tujuan, pendekatan empiris menyediakan bukti pelaksanaan, sedangkan pendekatan kritis memastikan kebijakan tetap peka terhadap keadilan sosial. Integrasi ini memungkinkan analisis kebijakan menjadi lebih holistik. Kebijakan tidak hanya dirumuskan berdasarkan idealitas, tetapi juga diuji melalui data serta direfleksikan secara kritis terhadap dampaknya. Pendekatan integratif juga membantu pengambil kebijakan menghindari keputusan yang terlalu teknokratis atau sebaliknya terlalu normatif (Pujiantoro & Panjaitan, 2025; Sudirman et al., 2022; Sugiannor, 2022).

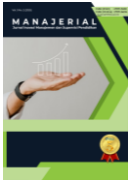
Relevansi dalam Analisis Kebijakan Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, penggunaan ketiga pendekatan menjadi sangat penting. Kebijakan pendidikan selalu mengandung dimensi nilai, seperti tujuan pembentukan karakter dan pemerataan akses. Di sisi lain, implementasi kebijakan pendidikan memerlukan data mengenai kualitas pembelajaran, capaian siswa, serta efektivitas program. Selain itu, kebijakan pendidikan juga perlu dianalisis secara kritis untuk memastikan tidak memperkuat kesenjangan sosial maupun ketidakadilan akses pendidikan. Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan yang memadukan pendekatan normatif, empiris, dan kritis berpotensi menghasilkan kebijakan yang lebih relevan, adaptif, dan berkeadilan. Integrasi pendekatan ini juga memperkuat proses evaluasi kebijakan sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Pembahasan

Analisis terhadap karakteristik pendekatan kebijakan menunjukkan bahwa integrasi antara dimensi normatif, empiris, dan kritis merupakan fondasi krusial bagi pengembangan kurikulum yang relevan. Pendekatan normatif secara fundamental menempatkan nilai dan prinsip keadilan sebagai orientasi utama dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan nasional. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan bertransformasi menjadi instrumen untuk membentuk manusia yang beriman dan berakhlak mulia melalui standar ideal yang ditetapkan sejak tahap perumusan (Hidayat & Suharto, 2022; Sakdah & Hidayat, 2022; Selamat et al., 2022). Peran normatif ini memberikan landasan filosofis yang kokoh, memastikan bahwa pendidikan tidak sekadar menjadi aktivitas regulasi administratif tanpa makna moral. Namun, fokus pada standar ideal ini sering kali dianggap terlalu abstrak apabila berdiri sendiri tanpa dukungan data lapangan yang nyata. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian literatur, kebijakan yang baik harus mampu menyelaraskan antara visi jangka panjang dengan realitas sosial yang ada guna memitigasi ketimpangan yang muncul sejak awal perancangan (Febrinaharnum & Prasojo, 2025; Molla, 2021; Wibisono & Purwanto, 2020; Yaneri & Deswanti, 2021). Oleh karena itu, dimensi normatif berfungsi sebagai kompas moral penjaga kebijakan agar tetap berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara utuh sesuai cita-cita bangsa.

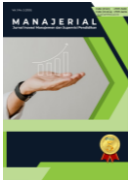
Pendekatan empiris hadir sebagai instrumen evaluasi yang mendasar guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan pendidikan berdasarkan bukti objektif di lapangan. Berbeda dengan pendekatan normatif, analisis empiris membedah capaian program melalui indikator teknis seperti kualitas interaksi di kelas, pemahaman siswa, serta tingkat kesiapan guru dalam menjalankan kurikulum terbaru. Penggunaan fakta dan data primer memungkinkan para



pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan secara presisi dan melakukan perbaikan yang bersifat berkelanjutan (Akib, 2020; Fionita et al., 2024; Nurcahya et al., 2024; Yanti et al., 2024). Keunggulan utama pendekatan ini terletak pada kemampuannya menghasilkan analisis *evidence-based* yang meminimalisir subjektivitas dalam penilaian keberhasilan suatu program sekolah. Meskipun unggul dalam menghasilkan data konkret, pendekatan empiris memiliki keterbatasan pada fokus yang terlalu teknokratis sehingga berisiko mengabaikan dimensi etika dan keadilan sosial dalam proses belajarnya. Data lapangan sering kali menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia yang tersedia di berbagai wilayah. Tanpa dukungan data yang akurat, perbaikan kebijakan pendidikan akan sulit mencapai target yang diharapkan dan justru berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran negara serta waktu pelaksanaan kurikulum nasional.

Perspektif kritis memberikan kontribusi yang lebih mendalam dengan membongkar dinamika kekuasaan, ideologi, dan kepentingan tersembunyi yang memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Pendekatan ini menantang pandangan bahwa kebijakan hanyalah solusi teknis semata, melainkan melihatnya sebagai produk sosial yang berpotensi memperkuat struktur ketimpangan yang sudah ada. Dalam analisis kebijakan pendidikan, dimensi kritis sangat diperlukan untuk memastikan bahwa akses terhadap kualitas pembelajaran bersifat setara bagi kelompok masyarakat dengan latar belakang ekonomi dan geografis yang berbeda (Molla, 2021; Putri & Salito, 2024; Raflika et al., 2024; Triguna et al., 2023). Penekanan pada aspek keadilan dan kesetaraan mendorong terciptanya ruang refleksi bagi para pemangku kepentingan agar lebih peka terhadap dampak marjinalisasi kelompok tertentu. Meskipun demikian, pendekatan kritis sering kali dikritik karena terlalu berfokus pada kritik struktural tanpa memberikan rekomendasi teknis yang aplikatif bagi praktisi di lapangan. Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya mengungkap relasi kuasa yang memengaruhi alokasi sumber daya pendidikan secara tidak proporsional di tengah masyarakat. Dengan mengadopsi cara pandang *top-down* yang dievaluasi secara kritis, kebijakan pendidikan dapat diarahkan untuk menjadi lebih partisipatif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dalam jangka panjang.

Analisis terhadap kelebihan dan keterbatasan setiap pendekatan menunjukkan bahwa ketergantungan pada satu metode saja akan menghasilkan simpulan yang tidak lengkap dalam memahami kompleksitas pendidikan. Pendekatan normatif sangat kuat pada visi filosofis namun cenderung lemah dalam eksekusi teknis, sementara pendekatan empiris sangat akurat secara data namun sering mengabaikan visi nilai jangka panjang. Di sisi lain, pendekatan kritis sangat tajam dalam mengungkap ketidakadilan sosial tetapi terkadang sulit diimplementasikan menjadi langkah praktis yang operasional (Abdy et al., 2026; Apriandira & Krisnani, 2021; Bangsawan, 2023; Pemberian, 2024; Wijiharjono, 2021). Adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dengan realitas implementasi menuntut adanya integrasi metode yang lebih luwes dan adaptif. Misalnya, kebijakan kurikulum yang dirumuskan secara ideal harus diuji efektivitasnya melalui bukti *evidence-based* dan direfleksikan dampaknya terhadap kelompok rentan. Tanpa adanya keseimbangan, kebijakan pendidikan berisiko menjadi terlalu teknokratis yang hanya mengejar angka atau terlalu normatif yang hanya berhenti pada retorika nilai tanpa aksi nyata. Oleh karena itu, penggabungan ketiga perspektif ini menjadi syarat mutlak dalam menghasilkan kebijakan yang tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga bermartabat secara moral dan sosial bagi bangsa Indonesia melalui proses evaluasi yang dilakukan secara jujur dan transparan.



Integrasi pendekatan normatif, empiris, dan kritis dalam analisis kebijakan pendidikan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem yang lebih *holistic* dan berkeadilan. Sinergi ini memungkinkan kebijakan untuk dirumuskan berdasarkan arah tujuan yang jelas, diukur melalui bukti pelaksanaan yang valid, dan dipastikan tetap peka terhadap isu keadilan sosial (Pujiantoro & Panjaitan, 2025; Sudirman et al., 2022; Sugiannor, 2022). Relevansi penggunaan ketiga pendekatan ini dalam konteks pendidikan di Indonesia sangat tinggi mengingat adanya tantangan geografis dan keberagaman sosial ekonomi yang sangat luas. Kebijakan pendidikan yang adaptif harus mampu merespons data capaian siswa sekaligus menjaga integritas pembentukan karakter yang menjadi visi nasional. Melalui pendekatan integratif, pengambil kebijakan dapat menghindari keputusan yang bersifat bias atau sepihak, sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan akuntabel. Keberhasilan transformasi pendidikan sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk merefleksikan diri secara kritis terhadap setiap program yang dijalankan demi perbaikan mutu yang berkelanjutan. Pada akhirnya, perpaduan metode ini akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tidak hanya responsif terhadap tuntutan zaman tetapi juga tetap berakar pada nilai-nilai luhur dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui tata kelola yang profesional.

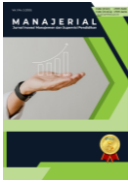
KESIMPULAN

Kajian konseptual ini menyimpulkan bahwa integrasi perspektif normatif, empiris, serta kritis merupakan kerangka analisis yang sangat krusial dalam memahami dinamika kebijakan publik secara menyeluruh. Pendekatan normatif memberikan arahan mengenai nilai serta tujuan ideal, sementara pendekatan empiris menyediakan landasan faktual berdasarkan bukti pelaksanaan di lapangan yang nyata. Di sisi lain, perspektif kritis menghadirkan refleksi mendalam terhadap relasi kekuasaan serta dampak sosial guna memastikan terciptanya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbagai sudut pandang tersebut memiliki karakteristik unik yang saling melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan apabila ingin menghasilkan penilaian kebijakan yang utuh serta mendalam. Penggunaan model analisis yang bersifat *holistic* ini memungkinkan setiap kebijakan pendidikan dinilai tidak hanya dari kesesuaian tujuan tetapi juga dari efektivitas implementasi serta responsivitasnya terhadap realitas struktur sosial yang kompleks demi kemajuan bangsa.

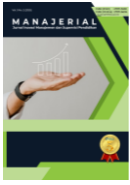
Para peneliti serta pengambil kebijakan disarankan untuk mengadopsi model analisis terpadu yang menggabungkan nilai, bukti lapangan, dan refleksi kritis secara simultan dalam setiap perumusan program pendidikan. Sangat penting bagi institusi pemerintah untuk melakukan pengujian model ini melalui berbagai studi kasus yang lebih spesifik guna memperkuat validitas serta daya terap kebijakan di masa depan. Pengembangan instrumen evaluasi yang bersifat *multidimensional* perlu diutamakan agar mampu menangkap aspirasi masyarakat sekaligus memvalidasi efektivitas program berdasarkan data yang akurat. Selain itu, kolaborasi antara akademisi dan praktisi harus terus ditingkatkan untuk membedah ideologi atau ketimpangan struktural yang mungkin menghambat pencapaian keadilan pendidikan. Melalui pendekatan yang bersifat *adaptive* dan berkeadilan, diharapkan setiap tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang dapat dijawab dengan solusi yang reflektif serta transformatif bagi kesejahteraan warga secara berkelanjutan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

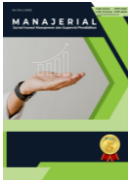
Abdy, I., Lasmawan, I. W., & Parmiti, D. P. (2026). Triangulasi persepsi: Analisis komparatif evaluasi guru, orang tua, dan siswa terhadap program makanan bergizi gratis di



- sekolah dasar di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. *Joyful Learning Journal*, 14(4), 392–402. <https://doi.org/10.15294/jlj.v14i4.39831>
- Akib, A. (2020). Evaluasi kebijakan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru pascasarjana IAIN Kendari. *Shautut Tarbiyah*, 26(1), 1. <https://doi.org/10.31332/str.v26i1.1441>
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku diskriminatif pada perempuan akibat kuatnya budaya patriarki di Indonesia ditinjau dari perspektif konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>
- Auladi, A. (2020). Kuasa pengetahuan masyarakat dan analisis hirarki Maqâsid Syarî'ah terhadap fatwa MUI tentang pencegahan penyebaran Covid-19. *SYARIATI*, 6(1), 31–42. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1259>
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan akselerasi transformasi digital di Indonesia: Peluang dan tantangan untuk pengembangan ekonomi kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>
- Barasa, M., & Riyanto, A. (2023). Analisis teori kekuasaan Michel Foucault atas propaganda media dalam membangun diskursus politik. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1), 188–195. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1785>
- Dahyanti, N., Diastami, S. M., Humaira, A., & Darmansah, T. (2024). Analisis kebijakan dalam mengatasi problematika pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 87–100. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i1.545>
- Farauqi, M. D. A. A. (2022). Analisis governmentalitas dan reproduksi wacana dalam sejarah munculnya program keluarga berencana di Indonesia tahun 1970. *Jurnal Politik Profetik*, 10(1), 38–60. <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i1a3>
- Febrinaharnum, H., & Prasojo, E. (2025). Refleksi kritis formulasi kebijakan publik di Indonesia: Studi pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2022. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 6(1), 66–76. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i1.228>
- Fionita, W., Lauchia, R., Windari, S., & Wijaya, H. A. (2024). Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(6), 5732–5739. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i6.4535>
- Hanson-DeFusco, J. (2022). William Newlin Dunn (1939–2022) “The truest measure of an academic pillar.” *Policy Sciences*, 55(3), 393–397. <https://doi.org/10.1007/s11077-022-09472-4>
- Hantono, H., Pangaribuan, W., Mudjisusatyo, Y., & Zainuddin, Z. (2024). Peran analisis kebijakan dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan manajemen pendidikan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(2), 590–600. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i2.3811>
- Hastuti, K., Susanti, H., & Erfando, T. (2022). Evaluasi kebijakan program MBKM dalam meningkatkan capaian pembelajaran lulusan perguruan tinggi. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(6), 7445–7454. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i6.4119>
- Hidayah, N., Nuro, P., Safia, A., Syahira, N., & Hamdani, I. (2023). Filsafat ilmu: Epistemologi post-strukturalisme dalam menjelajahi kekuasaan, pengetahuan dan kebenaran. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(6), 422–432. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i6.398>
- Hidayat, A., & Suharto, A. W. B. (2022). Landasan filsafat pendirian dan pendidikan karakter kemandirian anak yatim di lembaga kesejahteraan sosial anak. *EDUKATIF:*



- JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(3), 3979–3989.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2716>
- Irawan, A., & Haris, M. (2022). Urgensi peraturan daerah bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(1), 35–54.
<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1123>
- Molla, T. (2021). Critical policy scholarship in education: An overview. *Education Policy Analysis Archives*, 29, 2. <https://doi.org/10.14507/epaa.29.5655>
- Nurchahya, A., Qurtubi, A., & Fauzi, A. (2024). Kebijakan pendidikan dasar (wajib belajar sembilan tahun). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 12(1), 83–105.
<https://doi.org/10.30603/tjmpi.v12i1.4707>
- Pemberian. (2024). Analisis konflik sawit melalui lensa etika kepedulian-relasional dan upaya pembangunan perdamaian. *Aradha: Journal of Divinity Peace and Conflict Studies*, 3(2), 14–159. <https://doi.org/10.21460/aradha.2023.32.1284>
- Pujiantoro, I., & Panjaitan, P. (2025). Mengapa analisis kebijakan masih di pinggiran? *Jurnal Analis Kebijakan*, 9(2), 118–123. <https://doi.org/10.37145/a5es1655>
- Purike, E. (2021). Political communications of the Ministry of Education and Culture about “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (Independent Learning, Independent Campus)” policy: Effective? *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.35877/454ri.eduline361>
- Putri, P. L., & Salito, S. (2024). Dinamika kekuasaan, politik dalam pendidikan: Implikasi terhadap transformasi sosial dalam manajemen pendidikan di era industri 5.0. *BUDAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, 3(1), 14–20.
<https://doi.org/10.30659/budai.3.1.14-20>
- Raflika, L., Nasution, S., & Samahangga, K. (2024). Alat kebijakan dalam sistem pendidikan sebagai pilar untuk kemajuan pendidikan nasional. *Student Research Journal*, 2(6), 175–183. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v2i6.1636>
- Safitri, U., Nuarizal, A., & Gistituati, N. (2021). Urgensi analisis kebijakan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.29210/3003818000>
- Sakdah, M. S., & Hidayat, N. (2022). Implementasi nilai-nilai islami melalui pembiasaan dengan lembar mutaba’ah di masa pandemik Covid 19. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 1865–1874. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2230>
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2021). Rekonstruksi pendekatan compliance risk management di masa pandemi dalam upaya penguatan penerimaan pajak. *Scientax*, 3(1), 105–129.
<https://doi.org/10.52869/st.v3i1.240>
- Selamet, Supiana, & Zaqiah, Q. Y. (2022). Kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. *AL-MUNADZOMAH*, 1(2), 97–111.
<https://doi.org/10.51192/almunadzomah.v1i2.320>
- Sudirman, S., Sarjan, M., Rokhmat, J., Hamidi, H., & Fauzi, I. (2022). Penilaian pendidikan IPA secara realtime dan terintegrasi dengan artificial intelligence: Perspektif filsafat. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(4b).
<https://doi.org/10.29303/jipp.v7i4b.888>
- Sugiannor, S. (2022). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 2(2), 1–33.
<https://doi.org/10.24239/madika.v2i2.1357>



- Tauhid, I. (2020). Policies to overcome judicial mafia practices within the Supreme Court. *Ius Poenale*, 1(2), 107–118. <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2051>
- Triguna, I. B. G. Y., Mayuni, A. A. I., & Arsana, A. A. M. P. (2023). Strategi pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 13(2), 365. <https://doi.org/10.24843/jkb.2023.v13.i02.p01>
- Wandalibrata, M. P. (2020). Kajian metafisika “relasi kuasa” dalam pemikiran Michel Foucault. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 2(1), 61–69. <https://doi.org/10.47532/jic.v2i1.121>
- Waskitojati, D., Kameo, D. D., & Wiloso, P. G. (2020). Challenges to the agricultural development policy within a subsistence society: An analysis of the “revolutionary agricultural policy” in South Western Sumba. *Agric*, 31(2), 158–175. <https://doi.org/10.24246/agric.2019.v31.i2.p158-175>
- Wibisono, H. K., & Purwanto, S. A. (2020). Mobility perspective in anthropology of policy: Case studies urban policy in Indonesia. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 5(2), 265–283. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v5i2.11682>
- Wijiharjono, N. (2021). *Critical theory approaches in business studies and economics*. HAL (Le Centre Pour La Communication Scientifique Directe). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4939659>
- Yaneri, A., & Deswanti, A. D. (2021). Analisis kesetaraan gender dan inklusi sosial pada program perlindungan sosial: Studi kasus bantuan sosial tunai Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat. *Pekerjaan Sosial*, 20(1), 70–84. <https://doi.org/10.31595/peksos.v20i1.381>
- Yanti, A. D., Syaifudin, M., Mulio, A. T., Hendra, D., & Marlina, E. (2024). Evaluasi kebijakan pendidikan: Strategi untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam sistem pendidikan nasional. *Journal of Islamic Education El Madani*, 4(1), 47–52. <https://doi.org/10.55438/jiee.v4i1.138>
- Yanti, S. (2020). Analisis kebijakan pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>